

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara demokrasi yang mana negara demokrasi adalah suatu sistem dalam pemerintahan yang melibatkan rakyat secara keseluruhan, itu berarti masyarakat diberi kebebasan berpendapat dan kebebasan informasi serta pemerintah dituntut menjadi pemerintahan yang transparan dalam hal penyebaran informasi. Akan tetapi masih ada instansi atau lembaga yang belum sepenuhnya menerapkan sistem tersebut salah satunya ialah DPRD Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU). Sebab jika berbicara mengenai pemerintahan yang transparan, pada instansi ini proses transparasinya masih sangat terbatas. Membahas DPRD kabupaten TTU, pada instansi tersebut Komisi Pemilihan Umum (KPU) kabupaten TTU tahun 2019 ini sudah menetapkan daftar 30 anggota DPRD TTU, berdasarkan hasil dari pemilihan umum (pemilu) tahun 2019. Ke-30 anggota DPRD periode 2019-2024 terpilih ini berasal dari 4 daerah pemilihan yang berbeda di wilayah yang berbatasan dengan Negara Timor Leste. Selanjutnya ke-30 anggota DPRD ini akan dibagi dan dimasukkan dalam tiap-tiap komisi berdasarkan tugas dan fungsinya masing-masing. Sedangkan tugas dari komisi sendiri, yaitu untuk menjalankan tugas dan fungsi dalam bidang legislasi, anggaran dan pengawasan berdasarkan bidang tertentu.

DPRD kabupaten TTU juga membentuk Sekretariat DPRD yang berfungsi untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD. Sekretariat DPRD, susunan organisasi dan tata kerjanya ditetapkan dengan peraturan daerah (perda) dan personilnya terdiri atas Pegawai Negeri Sipil. Sekretariat DPRD dipimpin oleh seorang sekretaris DPRD yang diangkat dan diberhentikan dengan keputusan Bupati atas persetujuan pimpinan DPR. Lokasi dari kantor DPRD ini sendiri berada di Kabupaten Timor Tengah Utara

(TTU) tepatnya di kota Kefamenanu yang merupakan ibu kota dari kabupaten TTU. Kabupaten TTU merupakan sebuah kabupaten yang terletak di provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Indonesia. Luas wilayahnya adalah 2.669,7 km² dengan memiliki jumlah penduduk sebanyak Laki-laki 119.488 jiwa, dan Perempuan sebanyak 121.198 jiwa (<https://timortengahutarakab.bps.go.id>) Kabupaten TTU sendiri memiliki jumlah kecamatan sebanyak 24 Kecamatan, memiliki 33 Kelurahan dan 160 Desa.

DPRD kabupaten TTU melayani masyarakat yang memiliki keluhan-keluhan terkait tugas dan peran dari instansi tersebut, namun terkadang keluhan-keluhan atau laporan-laporan tersebut diterima namun tidak ditindak lanjuti bahkan tidak jarang diabaikan sehingga penyampaian keluhan-keluhan dari masyarakat ini tidak sampai pada wakilnya, juga tidak tersalurkan dengan baik dan tepat, serta waktu dan tempatnya yang masih sangat terbatas. Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten TTU masih mengandalkan penerimaan pelaporan dan monitoring yang dilakukan oleh masyarakat terhadap bentuk-bentuk pelayanan publik masih bersifat manual. Artinya masyarakat dalam hal ini harus datang secara langsung kepada lembaga tersebut. Hal ini menunjukkan belum terciptanya pelayanan publik yang efektif dan efisien dengan asas cepat, tepat dan biaya murah. Khususnya bagian sekretariat juga yang merupakan pusat dari segala informasi yang bertugas untuk menyediakan informasi-informasi seputar instansi DPRD kabupaten TTU masih secara manual.

Seiring dengan kemajuan teknologi, informasi dan komunikasi yang makin memudahkan interaksi antara pemerintah dengan masyarakatnya. Teknologi, informasi dan komunikasi (TIK) telah menjadi elemen utama dan faktor kritikal dalam kehidupan masyarakat sehari-hari (Vicente and Novo 2014). Dalam konteks tersebut, TIK di satu sisi telah menjadi instrument kunci dalam mendorong transformasi kerja pemerintah dalam melayani masyarakatnya. Dan disisi lain, TIK telah memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk berinteraksi satu dengan yang lain dan mendorong pelibatan masyarakat yang lebih luas dan

aktif. Dukungan TIK dalam mentransformasi kerja pemerintah menggunakan teknologi informasi sendiri telah dimulai sejak tahun 90an dengan penggunaan internet dan jaringan komputer di dalam mendukung penyelenggaraan pelayanan publik (Luna-Reyes and Gil-Garcia 2014). Fase ini terus berkembang dengan kerangka konsep pemerintahan *digital* atau *digital government*. Dengan konsep ini, penggunaan TIK dapat menjadikan pemerintah lebih terbuka, transparan, mampu mengembangkan demokrasi partisipasi dan membangun jaringan aktivis, sebagai upaya meningkatkan produktivitas dan pelayanan kepada masyarakat baik secara kolektif maupun individual.

Penjaringan partisipasi masyarakat ini sejalan dengan Surat Edaran Menpan No. SE/20M.PAN/6/2004 tentang peningkatan kualitas pelayanan publik melalui partisipasi masyarakat menuju ke pemerintahan yang baik. Sehingga dalam suatu instansi atau lembaga diwajibkan untuk melayani masyarakat yang memiliki keluhan-keluhan terkait tugas dan peran dari instansi tersebut, menyebarluaskan informasi mengenai kegiatan atau kebijakan para pejabat terkait, sebab masyarakat berhak mengetahui informasi dari pembuat dan pelaku kebijakan tersebut. Penyampaian aspirasi tersebut merupakan bagian dari pelayanan publik, dimana masyarakat dapat menyampaikan keluhan maupun saran perbaikan terhadap pelayanan yang diberikan. Sekaligus pemerintah dapat menciptakan pemerintahan yang baik (*good governance*) di mata masyarakat.

Salah satu solusi dalam mengatasi permasalahan yang ada di DPRD Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) adalah merancang bangun sebuah aplikasi yang dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengadukan berbagai bentuk ketimpangan atau pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh aparatur lembaga negara dalam melayani kepentingan masyarakat (pelayanan publik) serta dapat mengetahui informasi dari pembuat dan pelaku kebijakan yang berhubungan dengan lembaga atau instansi pemerintahan tersebut dengan cepat, akurat, dan efisien. Hal ini dimaksudkan juga agar praktik pelanggaran administrasi (maladministrasi) dapat diminimalisir, sekaligus bisa

diharapkan berdampak pada terciptanya pemerintahan yang bersih, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Dalam penyampaian aspirasi dari masyarakat untuk pemerintah, masyarakat dapat menyampaikan aspirasi nya kepada anggota dewan terkait yang dituju atau yang berhubungan dengan permasalahan tersebut disertai dengan dasar dan bukti-bukti yang konkrit.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang dibahas, maka dapat di rumuskan masalahnya yaitu :

1. DPRD kabupaten TTU dalam menangani pengelolaan aspirasi masyarakat yang diterima, belum terlaksana secara baik dan masih bersifat manual artinya masyarakat harus datang secara langsung kepada lembaga tersebut dan menyampaikan keluhan-keluhannya kemudian keluhan-keluhan atau laporan-laporan dari masyarakat tersebut akan dicatat dan disimpan dalam bentuk buku sehingga, data-data tersebut belum terkomputerisasi dengan baik.
2. Waktu yang ada sangat terbatas sehingga masyarakat harus menunggu lama untuk bertemu dan menyampaikan segala keluhannya mengingat kesibukan para aparatur pemerintah yang terkadang tidak dapat bertemu langsung dengan masyarakat sehingga akhirnya banyak keluhan dari masyarakat yang tidak sampai pada wakilnya.
3. Masyarakat tidak dapat memantau akan proses tindak lanjuti dari aspirasi yang sudah disampaikan.

1.3 Batasan Masalah

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini ialah :

1. Aplikasi ini hanya dapat digunakan sebagai penyampaian aspirasi masyarakat terhadap DPRD Kabupaten TTU yang akan ditanggapi dan diproses oleh admin, juga yang akan menampilkan informasi-informasi seputar terkait instansi tersebut.
2. Aplikasi ini belum dapat menyaring setiap aspirasi yang disampaikan *user*, sehingga setiap permasalahan yang sama dapat disampaikan oleh banyak *user*.
3. Aplikasi ini akan dibuat dalam bentuk *website* dengan menggunakan *framework Code Igniter (CI)*.
4. Metodologi yang digunakan adalah metode rekayasa perangkat lunak dengan model *Waterfall*.

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini ialah :

1. Aplikasi ini membantu pihak DPRD dalam mengolah data aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat dan membantu agar data-data yang sudah disampaikan dapat terkomputerisasi dengan baik.
2. Untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam menyampaikan pendapat atau aspirasinya yang tidak dibatasi oleh waktu dan tempat juga dalam hal, masyarakat dapat mengetahui informasi yang terpercaya dan akurat mengenai instansi terkait dengan mudah.
3. Masyarakat dapat memantau proses tindak lanjut dari aspirasi yang sudah disampaikan melalui sistem yang ada.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang didapat dari penelitian ini :

a. Bagi DPRD kabupaten TTU

Pemerintah DPRD kabupaten TTU sudah menjalankan kewajibannya untuk menjadi pemerintah yang baik (*good governance*) yang menyebarluaskan informasi mengenai segala bentuk kegiatan dan kebijakan yang dijalankan oleh badan publik karena hak memperoleh informasi adalah hak asasi manusia seperti yang diabadikan dalam UU KIP No. 14 Tahun 2008 bahwa setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik.

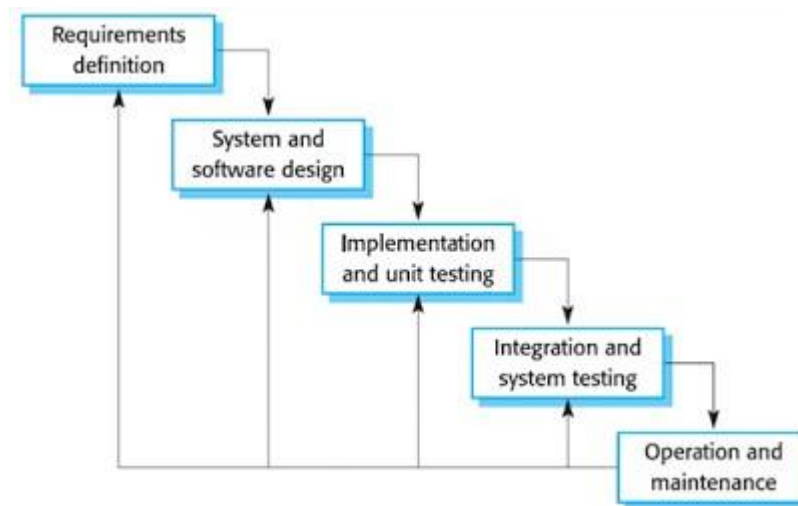
b. Bagi Masyarakat

Masyarakat diberikan kemudahan untuk menyampaikan aspirasinya menggunakan sistem yang akan dibangun ini. Masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi tidak perlu lagi datang ke gedung DPRD, aspirasi dapat disampaikan dan dimonitor melalui sistem tersebut.

1.6 Metodologi Penelitian

Metodologi yang digunakan adalah metode rekayasa perangkat lunak dengan model *Waterfall*. Metode pengembangan sistem *sekuensial linier* atau yang sering disebut juga dengan siklus kehidupan klasik atau model air terjun (*waterfall model*) memberikan sebuah pendekatan pengembangan sistem yang *sistematik* dan *sekuensial*, dimulai dari *fase* perencanaan sistem, analisis, desain, kode, pengujian, dan pemeliharaan (Pressman, 2002). Model ini adalah model klasik yang bersifat sistematis, berurutan dalam membangun *software*. Tahapan-

tahapan dari metode *Waterfall* adalah sebagai berikut: *Requirements Analysis and Definition, System and Software Design, Implementation and Unit Testing, Integration and System Testing, dan Operation and Maintenance.*



Gambar 1.1. *Model Waterfall*

Gambar 1.1 adalah bagan model *waterfall* yang merupakan metode pengembangan sistem yang digunakan pada rancang bangun Aplikasi Penyampaian Aspirasi pada Kantor DPRD Kabupaten TTU berbasis *website*. Penjelasan tahapan-tahapan dari metode *waterfall* adalah sebagai berikut:

1) *Requirements Analysis And Definition*

Layanan Aplikasi Penyampaian Aspirasi pada Kantor DPRD Kabupaten TTU berbasis *website*, kendala, dan tujuan ditetapkan oleh hasil konsultasi dengan bagian Sekertariat DPRD Timor Tengah Utara yang mengurus bagian pendataan dan penerimaan keluhan dari masyarakat yang kemudian didefinisikan secara rinci dan berfungsi sebagai spesifikasi aplikasi. Aplikasi penyampaian aspirasi pada DPRD kabupaten TTU berbasis *website* ini berfungsi sebagai wadah untuk menampung berbagai

keluhan, laporan atau aspirasi dari masyarakat untuk para wakilnya agar ditindak lanjuti. Pada tahap ini juga merangkum berbagai jenis-jenis keluhan atau aspirasi yang sering diutarakan oleh masyarakat pada DPRD kabupaten TTU, seperti:

1. Ketimpangan pembangunan antara Kota dan Desa. Disparitas pembangunan antara kota dan desa yang terjadi karena hampir tidak ada skalanya prioritas antara infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat dan infrastruktur berdasarkan keinginan pemangku jabatan (ada kala faktor janji politik)
2. Ketimpangan ekonomi (devisit), ini sudah amat jelas terasa dan tidak asing didengar, semua jabatan terdampak mulai dari anggota DPRD tunjangan tidak dibayar, PNS insetifnya tersendat, kontraktor banyak yang tidak terbayar, dana ADD (Alokasi Dana Desa) yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah tahap terakhir juga tertunggak.

Adapun metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah sebagai berikut :

- a. Wawancara (*interview*) yaitu teknik pengumpulan data dengan mengadakan tanya jawab/dialog secara langsung dengan pegawai DPRD Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) untuk memperoleh keterangan mengenai permasalahan dan proses yang terjadi selama pengambilan data tersebut. Pada tahap wawancara juga instansi terkait berharap sistem yang akan dibangun ini dapat membantu masyarakat menjawab semua permasalahan yang ada sekarang yaitu dalam penyampaian aspirasi.
- b. Studi pustaka merupakan teknik pengumpulan data dengan mempelajari literatur-literatur dari buku panduan, jurnal dan media internet yang memuat teori dan konsep mengenai permasalahan yang akan dibahas. Literatur-literatur ini digunakan sebagai

penunjang atau referensi untuk membantu dalam melakukan penelitian, memperkuat isi, serta panduan cara membuat aplikasi agar dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi.

2) *System And Software Design*

Tahapan perancangan Aplikasi Penyampaian Aspirasi pada Kantor DPRD Kabupaten TTU berbasis *website* mengalokasikan kebutuhan-kebutuhan sistem baik perangkat keras maupun perangkat lunak dengan membentuk arsitektur aplikasi secara keseluruhan. Perancangan aplikasi melibatkan identifikasi dan penggambaran abstraksi aplikasi dan hubungannya.

3) *Implementation And Unit Testing*

Pada tahap ini, perancangan Aplikasi Penyampaian Aspirasi pada Kantor DPRD Kabupaten TTU berbasis *website* direalisasikan sebagai serangkaian *code website*, *template*, dan *database*. Pengujian melibatkan verifikasi bahwa setiap *code website* memenuhi spesifikasinya.

4) *Integration And System Testing*

Code-code individu *website* digabung dan diuji sebagai sebuah Aplikasi Penyampaian Aspirasi pada Kantor DPRD Kabupaten TTU lengkap untuk memastikan apakah sesuai dengan kebutuhan atau tidak. Setelah pengujian, aplikasi penyampaian aspirasi ini dapat dikirimkan ke DPRD Timor Tengah Utara.

5) *Operation And Maintenance*

Aplikasi Penyampaian Aspirasi pada Kantor DPRD Kabupaten TTU dipasang dan digunakan secara nyata. *Maintenance* melibatkan pembetulan kesalahan yang tidak ditemukan pada tahapan-tahapan

sebelumnya, meningkatkan implementasi dari aplikasi, dan meningkatkan layanan aplikasi sebagai kebutuhan baru.

1.7 Sistematika Penulisan

Agar alur penyampaian Tugas Akhir ini lebih mudah dipahami, maka penulis menyajikannya dalam sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang, perumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini membahas tentang teori-teori dasar yang berkaitan dengan pembuatan aplikasi, mulai dari teori mengenai aplikasi pembelajaran, metode pengembangan yang digunakan sampai teori yang membahas tentang perangkat lunak yang digunakan untuk membuat aplikasi ini.

BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM

Bab ini berisi tentang analisis dan perancangan sistem, peran pengguna serta perangkat pendukung.

BAB IV IMPLEMENTASI SISTEM

Bab ini berisi tentang prosedur implementasi sistem. Hasil perancangan dan diterjemahkan dalam bentuk program yang bisa dibaca oleh komputer.

BAB V PENGUJIAN DAN ANALISIS HASIL

Bab ini berisi tentang pengujian sistem yang telah dibuat dan analisis hasil pengujian dari sistem tersebut.

BAB VI PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan topik permasalahan yang dibahas dalam tugas akhir ini.